

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RELIABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Paderry

Politeknik Raflesia Curup

Abstract

This study aims to examine and obtain empirical evidence about factors that affect the reliability of local government financial reporting. This research is motivated by the fact that the local government financial reporting should provide information on reliable in assessing accountability and decision making of various parties. Variables that will be tested in this study is the quality of human resources, utilization of information technology, accounting internal controls, and organizational commitment (as an independent variable) against the reliability of local government financial reporting (as the dependent variable).

The data in this study is the primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Data collected from 66 respondents who are local government financial reporting staff in the Rejang Lebong district. The hypothesis in this study were tested using t test and f test.

The results of this study is test showed that the quality of human resources, the utilization of information technology, internal accounting controls, and organizational commitment significantly influence the reliability of local government financial reporting.

Keywords: Financial reporting, reliability of local government financial reporting

1. Pendahuluan

Tujuan penyajian laporan keuangan oleh daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). Fenomena pelaporan keuangan daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Pencapaian opini Laporan Keuangan daerah di Indonesia saat ini masih rendah, sehingga perlu menjadi perhatian bersama bagi elemen yang terkait.

Persentase Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baru mencapai 23%, laporan keuangan merupakan cermin dari pengelolaan keuangan daerah, hasil pemeriksaan BPK pada Tahun 2013 terhadap 523 Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2012 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 120 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 319 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) atas 6 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 78 LKPD (www.BPK.go.id 2013).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebuah jaminan sepenuhnya Laporan Keuangan Daerah sudah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memenuhi

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2013 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap audit Laporan Keuangan Daerah Tahun 2012, di dalam Laporan Hasil Audit BPK tersebut masih terdapat banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, baik dari pengungkapan nilai akuntansi sampai temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun keterandalan merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) keandalan berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalin dan Kawedar (2011) dengan pertimbangan, obyek penelitian yang dilakukan di Satuan Kerja Badan Layanan Umum pada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan di kota Semarang. Penelitian ini secara spesifik meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum. Oleh karena itu, apakah faktor ini juga mempengaruhi keterandalan laporan keuangan di pemerintahan daerah, untuk itu peneliti mengambil obyek penelitian di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai; indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD, (Renyowijoyo, 2010). Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

2.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Ertambang (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Indriasari dan Ertambang, 2008). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang.

2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Haag dan Cummings (1998) dalam Renyowijoyo (2010) menyajikan lima kategori tugas pemrosesan informasi yang mencakup menangkap, menyampaikan, menciptakan, menyimpan dan mengkomunikasikan. Tiap tugas pemrosesan informasi tersebut menciptakan suatu sistem yang menangani tugas, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Kategori Pemrosesan Informasi dan Alat Teknologi Informasi

Tugas Pemrosesan Informasi	Keterangan	Alat Teknologi Informasi
Menangkap informasi	Memperoleh informasi pada titik asalnya	Teknologi input, misalnya: Mouse, Keyboard, Bar Code Reader
Menyampaikan informasi	Menyajikan informasi dalam bentuk yang paling berguna	Teknologi output, misalnya: Screen, Printer, Speaker
Menciptakan informasi	Memproses informasi untuk Untuk memperoleh informasi baru	Teknologi software, misalnya: Word Processing, Payroll, Expert Sistem
Mengkomunikasikan informasi	Menyampaikan informasi ke orang lain atau ke lokasi lain	Teknologi telekomunikasi, misalnya: Modem, Satelit

Sumber: Arsono, Laksmana dan Muslichah (2010 : 109)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari teknologi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi.

2.4. Pengendalian Intern Akuntansi

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern terbagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sedangkan pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Pengendalian akuntansi sangat penting bagi organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah, karena salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kekayaan organisasi tersebut. Pengendalian digunakan untuk memastikan sebuah organisasi mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan informasi yang tersedia dan membandingkan hasil aktual rencana. Mahmudi (2005) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sistem dan prosedur akuntansi, otorisasi, formulir, dokumen, dan catatan serta pemisahan tugas.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. sistem dan prosedur akuntansi daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

Otorisasi dalam sistem akuntansi daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal. Setiap transaksi yang terjadi di daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

Pemisahan tugas adalah fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

2.5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday et al. (1982) dalam Aritonang dan Syarif (2009) ini memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) kepercayaan yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi.

Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi. Mowday et al. (1982) dalam Pramitha (2010) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, yang antara lain adalah; a) dentifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi, b) keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan, dan c) loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. Selanjutnya Allen dan Meyer (1990) dalam Pramitha (2010) dengan tiga komponen organisasi yaitu: komitmen afektif (*effective commitment*), komitmen kontinuans (*continuance commitment*), dan komitmen normative (*normative commitment*). Hal yang umum dari ketiga komponen komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang menggambarkan hubungan individu dengan organisasi dan mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel independen dan dependen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Keterandalan pelaporan keuangan (KPK)	Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi.	1. Penyajian jujur 2. Dapat diverifikasi 3. Netralitas (PP No. 71 Tahun 2005)	Likert 1 s/d 5
2.	Kapasitas Sumber Daya Manusia (KSDM)	Kemampuan dari staf bagian keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pendidikan, pelatihan pemahaman tugas dan tanggung jawab terhadap kewajiban	1. Kapasitas staf 2. Tupoksi 3. Pendidikan dan training	Likert 1 s/d 5
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	Teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (<i>capture</i>), menyimpan (<i>store</i>), mengolah (<i>process</i>), mengambil kembali (<i>retrieve</i>), menampilkan (<i>represent</i>) dan menyebarkan (<i>transmit</i>) informasi.	1. Pemanfaatan komputer 2. Perkembangan web dan teknologi internet 3. Penggunaan software akuntansi 4. Perawatan	Likert 1 s/d 5
4.	Pengendalian Intern Akuntansi (PIA)	Suatu cara mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, berperan dalam pencegahan pendeteksian penggelapan di intern organisasi	1. Sistem dan prosedur akuntansi 2. Otorisasi 3. Pencatatan, dokumen, formulir dan up date serta dapat di audit. 4. Pemisahan tugas	Likert 1 s/d 5
5.	Komitmen Organisasi (KO)	keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi	1. Identifikasi (<i>identification</i>) 2. Keterlibatan (<i>involvement</i>) 3. Loyalitas (<i>Loyalty</i>)	Likert 1 s/d 5

3.2. Metode Penentuan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan pada SKPD di Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK dan Bendahara Pengeluaran yang berjumlah 78 orang. Penentuan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini dengan menggunakan Rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005:65).

$$\text{Rumus : } n = n/N(d)^2 + 1$$

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

$$n = 78/78 (0,05)^2 + 1$$

$$n = 66$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 responden. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan daerah.

3.3. Metode Analisis

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS. Sedangkan teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda.

Adapun model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis:

$$KLK = \beta_0 + \beta_1 \text{KSDM} + \beta_2 \text{PTI} + \beta_3 \text{PIA} + \beta_4 \text{KO} + \epsilon$$

Keterangan :

KLK : Keterandalan Laporan Keuangan

β_0 : Koefisien Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi X1, X2, X3, X4

KSDM : Kapasitas Sumber Daya Manusia

PTI : Pemanfaatan Teknologi Infomasi

PIA : Pengendalian Intern Akuntansi

KO : Komitmen Organisasi

ϵ : error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSDM	66	20	40	29.32	3.836
TI	66	24	40	33.58	3.692
PIA	66	13	34	21.03	4.896
KO	66	20	35	29.76	3.429
KTD	66	21	35	29.85	2.808

Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat diketahui bahwa jumlah data penelitian (n) adalah sebesar 66 data. Variabel kapasitas SDM mempunyai nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata kapasitas SDM adalah sebesar 29,32 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,836. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kapasitas sumber daya manusia pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Rejang Lebong tidak ada perbedaan. Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai minimum 24 dan nilai maksimum 40. Rata-rata pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 33,58. Nilai standar deviasi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 3,692. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa satuan kerja perangkat daerah kabupaten Rejang Lebong dalam pemanfaatan teknologi informasi sudah merata. Variabel pengendalian intern akuntansi mempunyai nilai minimum 13 dan nilai maksimum 34. Rata-rata pengendalian intern akuntansi adalah sebesar 21,03. Nilai standar deviasi pengendalian intern akuntansi adalah sebesar 4,896. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa pengendalian intern akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Rejang Lebong tyang digunakan idak ada perbedaan. Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai minimum 20 dan nilai maksimum 35. Rata-rata pengendalian intern akuntansi adalah sebesar 29,76. Nilai standar deviasi komitmen organisasi adalah sebesar 3,429. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa komitmen organisasi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Rejang Lebong tidak jauh berbeda. Variabel keterandalan pelaporan keuangan mempunyai nilai minimum 21 dan nilai maksimum 35. Rata-rata keterandalan pelaporan keuangan adalah sebesar 29,85. Nilai standar deviasi keterandalan pelaporan keuangan adalah sebesar 2,808. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa dalam keterandalan pelaporan keuangan antara satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan satuan kerja lainnya di Kabupaten Rejang Lebong adalah hampir sama.

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner memiliki r hitung lebih besar dari r table ($r \text{ hitung} > 0,226$), yang berarti masing-masing item pernyataan dari variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan pelaporan keuangan adalah valid yang artinya berkaitan dengan kemampuan kuesioner untuk mengukur atau mengungkap karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Per Variabel

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1)	0,401 - 0,847	0,242	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)	0,591 - 0,867	0,242	Valid
Pengendalian Intern Akuntansi (X_3)	0,355 - 0,899	0,242	Valid
Komitmen Organisasi (X_4)	0,641 - 0,794	0,242	Valid
Keterandalan Pelaporan Keuangan (Y)	0,415 - 0,754	0,242	Valid

Selanjutnya hasil pengujian reliabilitas Uji reliabilitas dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi dan keterandalan pelaporan keuangan memberikan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Kuesioner	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,867	0,7	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,874	0,7	Reliabel
Pengendalian Intern Akuntansi	0,907	0,7	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,834	0,7	Reliabel
Keterandalan Pelaporan Keuangan	0,701	0,7	Reliabel

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis regresi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Adapun hasil pengujian sebagai berikut.

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Beta	t hitung	sig	Kesimpulan
KSDM	0.186	2.087	0.041	
PTI	0.186	2.267	0.027	H1 Ditolak
PIA	0.192	2.130	0.037	H2 Diterima
KO	0.721	8.811	0.000	H3 Ditolak

Adj R² = 0.38 atau 38 %
 Sig.F = 0,000
 F = 23,102

Berdasarkan tabel 4.10 di atas terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 23,102 lebih besar dari F tabel 2,523 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (alpha). Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah Rejang Lebong.

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,576. Nilai koefisien determinasi adjusted R square tersebut menunjukkan bahwa 57,6 persen variasi perubahan naik turunnya keterandalan pelaporan keuangan Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong dapat dijelaskan oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi, sedangkan 42,4 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Selanjutnya hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien regresi variabel kapasitas sumber daya manusia sebesar 0,186 (positif), yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,186 (positif), menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi akan semakin meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Selanjutnya koefisien regresi variabel pengendalian intern akuntansi sebesar 0,192 (positif), yang berarti bahwa semakin bagus sistem pengendalian intern akuntansi yang digunakan akan semakin meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah, tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Terakhir koefisien regresi variabel komitmen organisasi sebesar 0,721 (positif), bahwa semakin tinggi komitmen organisasi akan

semangkin meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah, tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut; kapasitas Sumber Daya Manusia (KSDM) berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan daerah. Pengendalian Intern Akuntansi (PIA) berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan daerah. Komitmen Organisasi Akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah perlu memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, mempunyai uraian peran dan fungsi yang jelas, peran dan tanggung jawab seluruh bagian keuangan ditetapkan berdasarkan aturan yang jelas, ada pedoman prosedur dan proses akuntansi yang ditetapkan, pelatihan-pelatihan dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam akuntansi, serta didukung anggaran untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin baik itu komputer yang cukup, jaringan internet sebagai alat penghubung pengiriman data, pembuatan pelaporan keuangan secara komputerisasi, laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistim informasi terintegrasi, pemeliharaan secara teratur, perbaikan peralatan secara tepat waktu. dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang meliputi, penyelenggaraan sistem akuntansi, daftar rekening yang tersedia dan digunakan, transaksi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah, dicatat dan up to date dan ada pemisahan tugas dalam pelaksanaan APBD. Diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik dan komitmen organisasi tinggi dalam penyusunan pelaporan keuangan yang akhirnya bermuara pada dihasilkan keterandalan pelaporan keuangan daerah.

References

- Andriani, Wiwik. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Kabupaten (Studi Pada Kabupaten Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, (Online) (diakses 11 April 2014). Vol 5 No.1 Juni 2010,ISSN 1858-3687 hal 69-80(<http://ojs.polinpdg.ac.id/index.php/JAM/article/download/316/308>).
- Arfianti, Dita. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Kabupaten (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang, (Online) (diakses 2 Mei 2014), (<http://eprints.undip.ac.id/29808/1/Skripsi018.pdf>).
- Ariesta, Fadilah. (2008). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Kabupaten. *jurnal akuntansi*, Universitas Negeri Padang (Online) (diakses 10 april 2014), (ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article)
- Aritonang, Aldiani Sultani dan Firman Syarif. (2009). Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12.
- Arsono, Laksmana dan Muslichah. (2002). "Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 4, No. 2, Nopember 2002: 106 – 125.
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Budiarso, Novi. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 3, FE. Universitas Sam Ratulangi

- Dedi R. Rahadi. (2007). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. Seminar Nasional Teknologi 2007. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2009). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 16*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta : Salemba empat.
- Indriantoro , Nur dan Bambang Supomo, (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (edisi revisi). Yogyakarta: BPFE.
- Indriyani, Desi dan Ertambang Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Kabupaten, (Online) (diakses 16 April 2014) (<http://smartaccounting.files.wordpress.com>).
- Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN.
- Mahyani, Desi Dwi dan Darwanis (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Kabupaten, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, (Online). (diakses 1 Mei 2014). Vol 2 No.1, Hal 1-17, (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2106117.pdf>).
- Mirnayanti. (2013). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Kabupaten (Studi Pada Kabupaten Kabupaten Majene Sulawesi Barat), skripsi, Universitas Hasanudin (Online) (diakses 10 April 2014), (<http://repository.unhas.ac.id>).
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustafa, Santiadji, Sutrisno, dan Rosidi. (2010). Analisis Faktor–Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Kota Kendari, *Jurnal Akuntansi*, (Online) (diakses 11 April 2014), (<http://elibrary.ub.ac.id>).
- Nugraheni, Sukirman, dan Sularso. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris Kabupaten Banyumas), Skripsi. (online) (diakses 15 april 2014).
- Nugroho, Yohanes Anton. (2011). *Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative.
- Pramitha, Supartha dan Riana. (2010). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan Koperasi Krama Bali. *E-Jurnal, Manajemen*, Universitas Udayana, Bali.
- Prpto, Susilo. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Kabupaten (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sragen). Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (Online) (diakses 2 April 2014), (<http://digilib.uns.ac.id>).
- Renyowijoyo, Muindro. (2010) *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013*. www.bpk.go.id. Di akses 11 Juni 2014.
- Riduwan. (2005). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Rosalin, Faristina dan Kawedar, Warsito (2011) Faktor-faktor yang Mempe-ngaruhi Keandalan dan Timeless Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
- Sarwono, Jonathan. (2008). Statistik itu mudah panduan lengkap untuk belajar Komputasi Statistik menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Metode Skripsi dengan SPSS*. Elek Media Komputindo.Indonesia.
- Sawyer et al. (2005). *Sawyer’s Internal Auditing-Buku 1*. 5th ed. Salemba empat. Jakarta.Indonesia.
- Septiani, Aditya. (2005). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang sedang Berkembang : Perspektif Teori Pengungkapan. Tesis, Magister Akuntansi, Undip, Semarang.
- Wahyudi, Johan. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Kabupaten Dengan Pengendalian Internal Akuntansi Sebagai Variabel

-
- Intervening. Skripsi, IKIP, Mataram, (Online), (diakses 26 April 2014) (<http://johanjangkar.blogspot.com/2011/12/blog-post.html>).
- Widjajanto, Nugroho. (2001). Sistem Informasi Akuntansi, Erlangga, Jakarta.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Kabupaten Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten), (Online) (diakses 28 April 2014) Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, (http://blog.umy.ac.id/erwin/files/2012/05/ASP_18.pdf).
- Yosa. (2010). Birokrasi,(Online), (diakses pada 11/06/2014) (<http://itjendepdagri.go.id/article-24-birokrasi.html>)
- Zuliarti, (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Kabupaten (studi pada pemerintah Kabupaten Kudus). Skripsi, FE, Universitas Muria Kudus.

Halaman ini sengaja dikosongkan